

## **KEEFEKTIVITASAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN BONE**

*Effectiveness of Water Resources Management System in Bone District*

**Muhazzab<sup>1</sup>, Syamsuddin Maldung<sup>1</sup>, Umar Congge<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Bosowa

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Negara STISIP Sinjai

Email: muhazzab2121@gmail.com

Diterima : 21 Juli 2019

Dipublikasikan : 09 Desember 2019

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem jaringan irigasi di Kabupaten Bone, dan untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan fungsi irigasi di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat survey. Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya. Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang mengelola jaringan irigasi adalah pegawai dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang pengelolaan jaringan irigasi. Pelayanan, pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan jaringan irigasi memuaskan masyarakat khususnya petani. Birokrasi. Keberadaan birokrasi dapat mendukung kelancaran pengelolaan jaringan irigasi khususnya di Kabupaten Bone. Efektivitas Fungsi Irigasi. efektivitas fungsi irigasi di Kabupaten Bone berjalan efektif. Hal ini dibuktikan, jika saluran irigasi mengalami kerusakan atau gangguan maka masyarakat akan kewalahan dalam hal pengairan di petak sawah mereka.

**Kata Kunci:** Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone

### **ABSTRACT**

*The purpose of the research based on the background and formulation of the problem is to find out and analyze the irrigation network system in Bone Regency, and to find out and analyze the effectiveness of the irrigation function in Bone Regency. This type of research is a qualitative survey research. Validation of data is to guarantee that between what is observed and researched is appropriate and actually exists and the event is indeed happening and can be trusted. The process of data analysis in this study, is essentially carried out to find a pattern, by studying and analyzing all available data from various sources obtained from direct observation, interviews. The results showed that the human resources (HR) who manage the irrigation network are employees and the public who have competence and expertise in the field of irrigation network management. Service. the services provided in the management of irrigation networks satisfy the community, especially farmers. Bureaucracy. The existence of bureaucracy can support the smooth management of irrigation networks, especially in Bone Regency. Effectiveness of Irrigation Functions. the effectiveness of the irrigation function in Bone Regency is effective. This is proven, if the irrigation canal is damaged or disturbed then the community will be overwhelmed in terms of irrigation in their rice fields.*

**Keywords:** Bone District Water Resource Management System

### **PENDAHULUAN**

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi semua manusia dan setiap makhluk hidup. Tanpa air, maka tidak akan ada suatu kehidupan di muka bumi ini. Selama ini air seperti halnya udara telah dianggap oleh manusia sebagai barang yang wajar, selalu ada, dan tersedia setiap saat. Namun, pendapat tersebut pada saat ini mulai dipertanyakan kebenarannya. Kenyataannya, manusia baru menyadari betapa pentingnya peranan air pada saat kemarau panjang atau banjir kesadaran tersebut mendorong manusia untuk berusaha untuk mengendalikan ketersediaannya.

Dalam konteks inilah, negara kemudian dituntut untuk mampu memainkan peran strategis. Penegasannya dapat dijumpai di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, negara diberi wewenang untuk melakukan penguasaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Di bidang sumber daya air, penguasaan negara tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya air.

Prediksi peningkatan populasi di Asia pada tahun 2025 sekitar 4,2 milyar. Menurut International Policy Research Institute, prediksi tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan jumlah produksi makanan dunia mencapai dua kali lipat pada tahun 2020. Upaya pencapaian target membutuhkan dukungan dari sistem irigasi yang baik (Pasolong, 2011). Strategi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi".

Hubungan antara irigasi dan produktivitas tanaman sangat erat, namun kondisi sistem irigasi di hampir seluruh negara mengalami krisis karena faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari total luas lahan 250 juta ha, sebagian besar merupakan lahan beririgasi yang memanfaatkan sumber air dari aliran permukaan dengan kinerja irigasi kurang hingga sedang. Pencapaian efisiensi, kecukupan, dan keberlanjutan pada pengelolaan saluran terbuka merupakan tantangan besar (Renault dkk., 2007).

Selain itu peningkatan populasi, pengembangan sosial ekonomi, dan urbanisasi mengakibatkan tipe peruntukan air semakin meningkat. Namun, ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan semakin menurun, sehingga memicu terjadinya konflik perebutan air baik antar sektor internal maupun eksternal irigasi (Soto dkk., 2013).

Sektor pertanian memiliki kebutuhan air terbesar, jadi peran pengembangan strategi manajemen sistem irigasi yang adil dan efisien sangat diperlukan, salah satunya melalui pendistribusian air irigasi yang terukur, rasional, dan hemat untuk mencegah timbulnya krisis air. Kinerja irigasi dipengaruhi oleh aset wujud dan nirwujud. Penurunan kondisi dan fungsi prasarana irigasi yang termasuk dalam aset wujud merupakan permasalahan yang paling umum terjadi. Awalnya peningkatan kinerja irigasi hanya terbatas pada pembaharuan peralatan dan bangunan fisik saja.

Pada dekade terakhir di abad ke-20, terjadi perubahan paradigma dari pengembangan irigasi yang fokus pada perbaikan aset fisik menjadi pembenahan institusi melalui penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada instansi dan organisasi pertanian yang lainnya. Namun, program tersebut juga menghadapi beberapa kendala seperti warisan prasarana yang buruk dan pembiayaan operasional tidak mencukupi, selain itu kondisi sumberdaya manusia dalam organisasi belum siap serta kurang berpengalaman untuk melakukan pengelolaan irigasi di tingkat tersier (Renault dkk, 2007).

Strategi manajemen transfer yang dikembangkan oleh World Bank tersebut belum dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan dana pengelolaan irigasi di tingkat tersier. Rusaknya kondisi prasarana irigasi dan rendahnya produktivitas petani mengakibatkan kemampuan pembayaran dana swadaya rendah. Namun, di sisi lain kebijakan ini juga memiliki nilai positif seperti meningkatkan atensi petani pada pengelolaan dan pengamanan jaringan irigasi, menghargai aspirasi petani, dan menempatkan petani dalam wadah organisasi.

Kebijakan-kebijakan terkait sistem irigasi memberikan pembelajaran bahwa diperlukan strategi pengembangan irigasi yang komprehensif. Pengembangan prasarana perlu didukung dengan pengembangan sumberdaya manusia pengelolanya, sehingga kinerja prasarana irigasi bisa sesuai atau melebihi umur ekonominya. Hal ini menjadi dasar terbentuknya kebijakan Modernisasi Irigasi (Playan dan Mateos, 2006). Modernisasi Irigasi di Indonesia dimaknai sebagai "upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia". Kerangka pemikiran baru dalam modernisasi irigasi yaitu berupa perubahan ide atau konsep tidak hanya sekedar perubahan penggunaan teknologi yang modern (Anonim, 2011). Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan irigasi dengan cara memaksimalkan kinerja seluruh pilar dalam sistem irigasi. Rehabilitasi atau pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan pengelola layanan agar pengembangan tersebut lebih tepat guna.

Pengoperasian irigasi ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan luas layanan di Indonesia ±8,6 juta ha dengan jaminan air irigasi yang mencukupi. Secara nasional jumlah air masih surplus ±66,45 milyar m<sup>3</sup>, namun di Pulau Sulawesi mengalami kekurangan ±38,4 milyar m<sup>3</sup> (Sutardi, 2004). Kondisi ini timbul karena kebutuhan non irigasi tumbuh semakin pesat dibarengi dengan penurunan debit sumber air akibat degradasi daerah tangkapan air. Untuk mengatasi kekurangan air irigasi dimusim kemarau dilaksanakan dengan pengelolaan air secara efisien sehingga jangkauan pelayanan dapat dipertahankan, salah satunya dengan menertibkan pola tanam, agar sesuai dengan ketersediaan air.

Daerah Irigasi Sanrego merupakan salah satu layanan sistem Operasi jaringan irigasi. Sesuai pola operasi irigasi Sanrego, daerah ini merupakan bagian hilir dari cakupan layanan yang meliputi Kabupaten Bone dengan pola tanam rencana padi-padi-palawija. Pola ini disusun karena ketersediaan air musim kemarau yang selalu merosot, sehingga hanya mampu mengairi pada Musim Tanam (MT) III dengan tanaman palawija. Pola tanam per daerah kabupaten ditetapkan oleh Bupati, sebagai pedoman pembagian air baik jumlah, waktu maupun lokasi, sehingga dimungkinkan pembagian air secara merata, dan sesuai peruntukannya di wilayah kabupaten.

Pelaksanaan pola tanam ditingkat petani selama ini tidak sesuai dengan rencana, karena petani lebih suka menanam padi pada MT III, sehingga mengakibatkan porsi pemakaian air persatuan luas meningkat, sedangkan ketersediaan air tidak mencukupi. Akibat kondisi tersebut sering terjadi konflik dalam konsumsi air karena adanya gap yang besar antara supply dan demand. Konflik sering ditandai dengan pengambilan air secara illegal, dan pemompaan air dangkal secara berlebihan.

Pengoperasian irigasi menunjukkan kinerja yang cukup baik saat musim hujan sampai awal kemarau (MT I dan II) dengan debit dialirkan 11-13 m<sup>3</sup>/dt, namun menurun menjadi 5-7 m<sup>3</sup>/dt pada musim kemarau (MT III). Angka kebutuhan air tanaman padi rata-rata 1,00 l/dt tidak akan mencukupi dengan debit air tersebut bila dihitung dengan areal layanan diatas.

Realisasi setiap musim kemarau (MT III) 9.197 ha atau 94,65% areal merupakan tanaman padi, sehingga ketersediaan air tidak mencukupi. Untuk mempertahankan tanaman sampai umur panen, petani harus memompa air dari saluran secara illegal, memompa sungai dan air tanah, dengan biaya yang relatif besar. Fenomena ini berulang setiap tahun, dan kemauan petani untuk tetap menanam padi di MT III masih sangat kuat, walaupun diduga secara financial usaha ini tidak menguntungkan akibat pertambahan ongkos produksi yang besar dalam mensuplai air irigasi di petak masing-masing petani. Maka dibutuhkan strategi pelayanan dalam pengelolaan irigasi untuk meningkatkan kepuasan para petani. Dengan meningkatnya produksi pertanian maka diharapkan dapat meningkatkan swasembada beras khususnya di Kabupaten Bone.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau disingkat PSDA Kabupaten Bone adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur pengairan terutama bagi para petani, selain itu juga sebagai daya pembangkit listrik. PSDA merupakan sebuah lembaga pemerintah yang

melaksanakan kegiatan mengatur pelayanan secara optimal, efektif dan efisien pada masyarakat pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dengan tepat waktu, ruang jumlah dan mutu, dan melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan sumber daya air. Maka dari itu, diperlukan rencana strategi pelayanan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau disingkat PSDA Kabupaten Bone, sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat dan menyebabkan tingkat kesejahteraan meningkat pula.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem jaringan irigasi di Kabupaten Bone, dan untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan fungsi irigasi di Kabupaten Bone.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat survei. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone. Informan kunci adalah pihak yang mengetahui secara pasti tentang pengelolaan sumber daya air, dalam hal ini adalah pihak dinas yang terkait yang terdiri atas: kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, dan staf khusus serta masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang jumlahnya 12 orang.

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya. Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis menggunakan teknik triangulasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi pada ketentuan umum dijelaskan: sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian terhadap sistem jaringan irigasi adalah SDM, pelayanan, birokrasi atau kelembagaan tentang irigasi. Masing-masing pembahasan terhadap fokus penelitian adalah sebagai berikut:

### **Sumber Daya Manusia**

Dalam pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Bone, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan fungsi irigasi bagi masyarakat khususnya petani. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: sumber daya manusia (SDM) yang mengelola jaringan irigasi adalah pegawai dan masyarakat yang

memiliki kompetensi dan keahlian dibidang pengelolaan jaringan irigasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diarini (2017) dengan hasil penelitian diperoleh: Dari hasil pengamatan di lapangan kondisi kritis ini berdampak pada beberapa hal yaitu pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak optimal, kurang terpeliharanya jaringan irigasi (JI) akan mengakibatkan tingginya biaya pemeliharaan, layanan kepada masyarakat berjalan lambat, banyaknya kehilangan pintu /aset, pencurian air, kualitas pelaporan 10 harian yang kurang baik serta kegaduhan dalam masyarakat. Dampak terakhir inilah yang paling tidak diinginkan karena sudah bisa mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat. Sepanjang belum ada regerasi, beberapa strategi yang dilakukan oleh Kepala UPTD Pengairan Wilayah Krejengan antara lain yang pertama sistem rangkap tugas. Sistem rangkap tugas ini misalnya Petugas Pintu Air dapat merangkap tugas sebagai petugas operasional bendung/pekerja.

Usulan pendidikan dan pelatihan teknis/ bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan setiap tahun ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo. Diklat teknis ini ditujukan untuk Kepala UPTD, Juru Pengairan, POB, staf kantor serta P3A/GP3A sebagai partner kerja di lapangan. Ketiga, dengan melakukan safari kerja bakti sebagai alat motivasi kerja tenaga di lapangan. Empat, memaksimalkan peran P3A/GP3A dalam pelaksanaan OP partisipatif. UPTD Pengairan Wilayah Krejengan setiap tahun khususnya menghadapi musim tanam pertama memiliki program unggulan berupa kegiatan gugur gunung yaitu kerja bhakti masal di jaringan irigasi bersama-sama dengan anggota P3A/GP3A pemanfaat jaringan irigasi serta masyarakat setempat. Partisipasi GP3A ini juga dapat dilihat pada kegiatan desain dan konstruksi partisipatif yang didanai oleh program WISMP atau kegiatan lain yang serupa dengan dana APBD Kabupaten Probolinggo. Kegiatan OP partisipatif ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan sense of belonging dan sense of responsibility dari para anggota P3A/GP3A.

Memaksimalkan peran teknologi informasi dan penggunaan alat bantu kerja modern. Beberapa petugas lapang pada saat ini sudah dibekali dengan Hand Phone android, handy talky, laptop/komputer, WIFI pada kantor UPTD serta motor boat. Motor boat ini berguna sekali dalam rangka penyusuran dan pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi. Yang terakhir kepala UPTD aktif melakukan sosialisasi tentang kegiatan operasi dan pemeliharaan. Kegiatan sosialisasi dilapangan dapat dilakukan dengan menggunakan media sosialisasi rapat-rapat koordinasi P3A/GP3A formil dan non formil, safari musrenbang desa serta safari senam pagi bersama. Beberapa strategi ini cukup ampuh untuk mengatasi keterbatasan tenaga di lapangan. Dari beberapa uraian diatas penulis dapat menyimpulkan dan menyarankan bahwa dalam rangka revitalisasi peran petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beberapa hal penting yang dapat diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut: yang pertama adalah perlu adanya regenerasi atau penambahan tenaga baru dilapangan, dengan diawali

analisa kebutuhan petugas lapang sesuai dengan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di lapangan maka sangat perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis/bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan. Diklat ini ditujukan bagi Kepala UPTD/Pengamat, para Juru Pengairan, Staf Kantor UPTD sebagai pengolah data serta petugas operasional bendung (POB). Ketiga, peningkatan penguatan/pemberdayaan P3A/GP3A. Di Wilayah Kerja UPTD Kerjangan terdapat 50 P3A dimana 9 desa sudah berbadan hukum sedangkan 41 lainnya belum berbadan hukum. Legalitas hukum ini sangat penting agar organisasi P3A dapat berjalan dengan baik untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di lapangan. Sehingga sangat perlu adanya peningkatan status P3A yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Penguatan P3A ini dapat juga berupa pengadaan bimbingan teknis OP untuk P3A/GP3A.

Selain itu dalam rangka pemberdayaan GP3A dapat pula melibatkan GP3A dalam kegiatan desain dan konstruksi partisipatif. Selanjutnya yang keempat, Pemerintah dapat memaksimalkan peran teknologi informasi. Untuk mempercepat pengiriman dan pengolahan data sangat perlu kiranya para juru dibekali HP android serta pengadaan WIFI dan laptop/komputer di kantor UPTD. Berikutnya adalah peningkatan sarana dan prasarana/alat bantu kerja. Alat bantu kerja ini dapat berupa alat potong rumput, climbing kit, motor boat serta sepeda motor. Keenam, perlu adanya monitoring dan evaluasi petugas operasi dan pemeliharaan setiap tahun. Kegiatan ini dapat berupa lomba pemilihan petugas OP jaringan irigasi teladan tingkat juru maupun tingkat kepala UPTD secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai nasional.

Kegiatan positif ini sangat berguna sebagai media pembelajaran, saling berbagi ilmu dan pengalaman antar petugas lapang. Selanjutnya pemerintah juga dapat memaksimalkan peran gender. Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan ini sangat kental dengan pekerjaan laki-laki. Namun demikian perempuan sebagai kekuatan potensial bangsa dapat juga berperan dalam kegiatan ini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 rasio laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah 101:100. Kekuatan yang seimbang. Yang terakhir dalam rangka revitalisasi peran petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah peningkatan kompensasi dan penghargaan terhadap para petugas lapang. Kompensasi dapat berupa tunjangan penghasilan, bantuan transport/perjalanan dinas, serta bantuan pulsa handphone. Untuk penghargaan dapat berupa material dan non material. Kompensasi dan penghargaan ini merupakan alat motivasi dan produktivitas yang sangat baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas lapang.

### **Pelayanan**

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan jaringan irigasi memuaskan masyarakat khu-

susnya petani. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017). dengan hasil dan pembahasan penelitiannya, maka dapat diuraikan bahwa : 1. Pemanfaatan saluran irigasi terhadap kesejahteraan para petani sudah tidak lagi kesulitan dalam mengairi lahan pertanian mereka karena sudah adanya sistem irigasi yang akan selalu menyalurkan sumber air yang tak pernah berhenti. Sistem irigasi ini bisa dibuka tutup, sehingga kapan saja petani membutuhkan air untuk lahan pertanian mereka, tinggal membuka saluran air tersebut. Pemerintah sudah memberikan fasilitas irigasi dan membangun sistem irigasi untuk dimanfaatkan oleh para petani. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa manfaat saluran irigasi yang harus diketahui diantaranya adalah melancarkan aliran air ke lahan sawah, mencukupi kebutuhan air pada lahan pertanian, mempermudah para petani untuk mengairi lahannya dan sebagai salah satu sarana pendukung ketahanan pangan, 2. Sistem saluran irigasi terhadap kesejahteraan petani saat ini sedang dalam perbaikan. Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa memiliki 13 Kelompok Tani. Pada saluran irigasi di daerah Kelompok Tani Beroanging sepanjang 583 meter, terdapat 100 meter diantaranya saat ini tidak berfungsi. Dan pada saluran irigasi di daerah Kelompok Tani Pangguntungang sepanjang 298 meter, terdapat 150 meter diantaranya saat ini juga tidak berfungsi. Hal ini menuai keluhan dari para petani yang bersangkutan karena sangat mempengaruhi kesejahteraan petani, tidak berfungsinya saluran irigasi ini dapat mengurangi hasil panen sehingga keuntungan yang didapatkan lebih sedikit dari sebelumnya, dan faktor yang menyebabkan saluran irigasi tidak berfungsi diantaranya adalah adanya sampah yang bertumpuk, kurangnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan irigasi tersebut, pengaruh cuaca hujan lebat dan kemarau, adanya peternak yang kurang memperhatikan ternakannya, kurang kokohnya saluran irigasi sejak awal dibangun, dan faktor yang mendukung saluran irigasi berfungsi / bertahan diantaranya adalah aktifnya masyarakat setempat bergotong-royong untuk menjaga ketahanan dan kebersihan saluran irigasi, tertibnya masyarakat mengatur pembuangan sampah, adanya perhatian pemerintah setempat terhadap ketahanan dan kebersihan saluran irigasi. adanya bantuan dana dari pihak luar, kokohnya saluran irigasi sejak awal dibangun.

### **Birokrasi**

Birokrasi adalah tipe suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis suatu pekerjaan (Ahmad 2008). Dalam pengelolaan sistem irigasi, peranan birokrasi sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaraan pengelolaan irigasi. Peran serta birokrasi dalam menentukan dan menetapkan aturan tentang pengelolaan birokrasi dapat meningkatkan keberhasilan panen petani. Maka, berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan birokrasi dapat mendukung kelancaraan pengelolaan jaringan irigasi khususnya di Kabupaten Bone.

Hasil penelitian yang sama di peroleh oleh Rita (2016) yakni Dalam kenyataannya di lapangan selama ini,

hampir tidak ada sistem irigasi yang sepenuhnya dikelola oleh petani juga tidak ada irigasi yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Pada irigasi teknis sekali pun, biasanya pemerintah mengelola bangunan utama dan saluran pembawa. Petani mengelola bagian petak tersier. begitu juga pada irigasi sederhana, banyak irigasi desa yang telah dibantu oleh pemerintah pengelolaannya melalui berbagai mekanisme bantuan, seperti Penanggulangan Kerusakan Irigasi Desa (PKID). Dalam pembentukan dan pengembangan komisi irigasi, terdapat tiga bentuk yaitu: 1) Komisi irigasi kabupaten kota; 2) Komisi irigasi provinsi; 3) Komisi irigasi antar provinsi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi.

Pada tahun 1925 telah dibentuk sebuah panitia yang diketuai Direktur BOW, yang bertugas menyusun Algemeen Water Reglement (AWR), sebuah peraturan yang menyangkut pengairan. Setelah bekerja selama 5 tahun, panitia menghasilkan sebuah konsep guna menyusun Peraturan Pengairan untuk Propinsi (= Provinciaal Water Reglement = PWR). Selanjutnya AWR 1936 dimajukan dalam Volksraad, disahkan dan diundangkan dalam Staatsblad 1936 No. 489 sebagai AWR 1936, berlaku sejak 17 Januari 1936. Karena AWR 1936 seolah olah hanya melindungi kepentingan penanaman tebu milik Belanda, sehingga jiwa Undang-undang itu sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, maka perlu disusun Undang-undang baru yang mengatur tentang air.

Seperti biasanya, anggota panitia yang berasal dari beberapa instansi dan tidak tinggal dalam satu kota, bekerja tekun selama bertahun tahun, dan pada tanggal 26 Desember 1974 akhirnya naskah U.U. tentang Pengairan dapat disahkan oleh DPR sebagai Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Potret legislasi di Indonesia belum banyak berubah. 1, produk legislasi kita belum dapat dioperasionalkan efektif, diimplementasikan dan berlaku secara nasional. 2, produk legislasi kita masih cenderung tumpang tindih, perlu diharmonisasikan. 3, banyak produk legislasi tidak segera diikuti dengan sosialisasi intensif. 4, produk legislasi ibarat sarang laba-laba, sanksi peraturan dapat menjerat hanya untuk yang lemah, jaring itu tidak mempan menjerat orang kuat. Beberapa langkah dalam rangka menegakkan sanksi, antara lain membangun politicalwill. 1, mengaplikasikan peraturan sesuai ketentuan harus menjadi panglima, bukan sekedar tulisan. 2, implementasi dari peraturan berdasarkan asas keadilan yang tidak memihak. 3, mempercepat proses revisi produk legislasi yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. 4, masyarakat juga harus membiasakan diri untuk taat pada peraturan perundangan, tidak mencari jalan pintas memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Ketika Peraturan Pemerintah (PP) 77 tahun 2001 tentang Irigasi diundangkan (5 Desember 2001), sehingga PPNomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi dinyatakan tidak berlaku. Lahirnya PP Nomor 77/2001 itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan desentralisasi yang dimuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu UU Nomor 22/1999 diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka kebijakan pengelolaan Irigasi diperbaharui dengan PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi. PP ini, mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Serangkaian langkah regulasi dibidang irigasi yang berujung pada hadirnya PP Nomor 20 tahun 2006, sesungguhnya langkah-langkah itu merupakan implikasi pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi. Secara implisit PP ini berupaya mematuhi Instruksi Presiden No. 3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, kebijakan itu meliputi: (1). Pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab pengelola irigasi; (2). Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air; (3). Penyerahan pengelolaan dan pembiayaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); (4). Penggalan sumber untuk biaya Operasi (O) dan Pemeliharaan (P) irigasi; dan (5). Kebijaksanaan keberlanjutan jaringan irigasi.

### **Efektivitas Fungsi Irigasi**

Saluran irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Dahulu para petani dalam mengairi sawah atau lahan pertanian mereka biasanya dengan cara membendung parit-parit lalu menyalurkan ke lahan mereka. Ada juga yang melakukan penangkutan air menggunakan ember. Namun cara tersebut sangatlah melelahkan dan ditambah lagi apabila musim kemarau, maka cara tersebut tidak bisa dilakukan. Dari pernyataan para petani diatas dapat diambil kesimpulan bahwa saluran irigasi adalah salah satu bagian yang berperan penting bagi perkembangan panen yang dimiliki oleh setiap petani dan juga sekaligus berpengaruh terhadap kesejahteraan petani yang bersangkutan.

Untuk menjaga kelancaran pengelolaan irigasi maka dibutuhkan partisipasi oleh masyarakat dan pemerintah. Maka berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan efektifitas fungsi irigasi di Kabupaten Bone berjalan efektif. Hal ini dibuktikan, jika saluran irigasi mengalami kerusakan atau gangguan maka masyarakat akan kewalahan dalam hal pengairan di petak sawah mereka.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Vivi Herlina dengan judul "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci" ([www.ejournal.kopertis10.or.id/index](http://www.ejournal.kopertis10.or.id/index), online: diakses tanggal 27 Agustus 2018). Hasil dari penelitiannya diperoleh salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah terlaksananya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melihat gambaran pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari sumber pembiayaan pembangunan fisik. Adapun sumber dari pembiayaan pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci adalah dari pemerintah yaitu dari dana ADD dan selebihnya dari swadaya masyarakat itu sendiri.

Adapun bentuk partisipasinya yaitu: Partisipasi uang yaitu bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan fisik, adapun partisipasi yang diberikan adalah berupa uang yang diberikan oleh para pengusaha dan pegawai yang terdapat di Desa Pungut Hilir karena mereka tidak sempat untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga maupun ikut serta dalam pengambilan keputusan, 2. Partisipasi harta benda, sebagian masyarakat Desa

Pungut Hilir juga menyumbangkan alat-alat kerja atau perkakas mereka untuk memperlancar pembangunan dan untuk lebih bisa memperoleh hasil yang sesuai keinginan dan maksud dari masyarakat itu sendiri dan 3. Partisipasi buah pikiran diberikan pada saat musyawarah saat akan dilaksanakan proses perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel, yaitu variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Indikator-indikator dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik adalah sebagai berikut:

1. *Prakarsa/inisiatif*, merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan prakarsa masyarakat, menyarankan strategi pemberdayaan terus menerus, terarah dan terencana dari pemerintah untuk mendorong masyarakat agar partisipasi masyarakat di Desa Pungut Hillir dalam pembangunan dengan bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan, 2. Indikator Pembiayaan berarti meningkatkan pembiayaan masyarakat, strategi yang disarankan adalah mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemerintah. Berdasarkan indikator kedua dapat diinterpretasikan bahwa pembiayaan baik berupa uang ataupun dari swadaya masyarakat menunjukkan suatu bentuk bagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ataupun kesadaran masyarakat bahwa dalam suatu pembangunan membutuhkan dana yang cukup, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain tetapi karena adanya kesadaran untuk membangun daerahnya, 3. Indikator Pengambilan Keputusan yaitu pengambilan keputusan berarti meningkatkan pembuatan keputusan oleh masyarakat, strategi yang disarankan adalah memperkuat posisi modal sosial yang ada di masyarakat dan juga menekankan pada fasilitator untuk terus menerus mengingatkan masyarakat akan pentingnya peranan mereka dalam membuat keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator ketiga tentang pengambilan keputusan dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat berhak untuk ikut dan terlibat dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bukan keputusan sendiri, serta adanya keterbukaan dan akuntabilitas antara pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan agar pembangunan yang diharapkan dapat berlangsung efektif dan efisien serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, dalam pengambilan keputusan seharusnya menggunakan kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan dari musrenbang (musyawarah rencana pembangunan desa) antara aparat desa dan masyarakat yang telah diterapkan sebelum pembangunan dilaksanakan, 4. Indikator mobilisasi tenaga berarti meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, menghidupkan kembali organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk memobilisasi tenaga. Dari indikator keempat tersebut dapat diinterpretasikan antara teori yang menjadi dasar dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa

keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan, serta dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, agar untuk kedepannya masyarakat dapat merasa diri mereka sangatlah penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain partisipasi masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan disekitarnya, serta 5. Indikator pelaksanaan pembangunan yaitu pelaksanaan berarti bahwa masyarakat ikut serta melaksanakan langkah-langkah yang telah diambil dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dipandu dalam kegiatan pembangunan ini. Dari indikator kelima tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir karena adanya pembangunan yang belum dilaksanakan karena keterbatasan dana sementara pembangunan fisik yang benar-benar dibutuhkan tidak diperbaiki, seharusnya pembangunan diutamakan yang lebih diperlukan daripada yang tidak terlalu diperlukan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, bahwa, Sistem Jaringan irigasi, termasuk Sumber Daya Manusia, yang mengelola jaringan irigasi telah memiliki kompetensi dan keahlian dibidang pengelolaan jaringan irigasi, begitu pula faktor pelayanan., sudah memuaskan masyarakat khususnya petani serta birokrasi dapat menunjang dan mendukung kelancaraan pengelolaan jaringan irigasi khususnya di Kabupaten Bone. Pengelolaan jaringan irigasi khususnya di Kabupaten Bone sudah berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Anwar. (1984). Strategi Komunikasi: Suatu Pengantar Ringkas. Bandung: Armico.
- Fadilah, Putra. (2001). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya : Pustaka Pelajar
- Lupiyoadi, Hamdani. (2006). Manajemen Pemasaran Jasa, Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moerir, A.S. (2001). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia Edisi I. Jakarta: Bumi Aksara.
- ..... (2010). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Purnomo, Setiady. (2000). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Rangkuti, Freddy. (2003). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratminto, dan Winarsih Atik Septiasih. (2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Jaya.

- 
- Sinambela, Litjan Poltak. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Supranto. 1997. Pengukuran Tingkat kepuasan Pelanggan. Jakarta: Rineka cipta.
- ..... (2006). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan: Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriatna Tjahja. (2000). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjiptono, Fandy & Diana Anastasia. (2003). Total Quality Management, Yogyakarta: Andi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).